



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Sidang ke-	: IV (empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>
Hari/Tanggal	: <b>Kamis, 25 Maret 2021.</b>
Pukul	: <b>09.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual menggunakan Media Zoom)
Pimpinan Rapat	: <b>H. Syaiful Huda/ Ketua Komisi X DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Dampak Pemotongan Anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp 342.145.794.000,- (sesuai Raker 26 Januari 2021).</li><li>2. Skema Anggaran Fungsi Pariwisata di K/L terkait (sesuai Raker 26 Januari 2021).</li><li>3. Pembahasan Isu-Isu Strategis Pariwisata dan Ekraf (Hibah Pariwisata, Perkembangan Peraturan Turunan UU Ekraf, Konsep Destinasi Wisata Terintegrasi dengan Destinasi Prioritas dan Super Prioritas).</li></ol>
Hadir Komisi X DPR RI	: 35 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <b>Sandiaga Salahuddin Uno/Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI beserta jajaran.</b>

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh H. Syaiful Huda/ Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf/Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

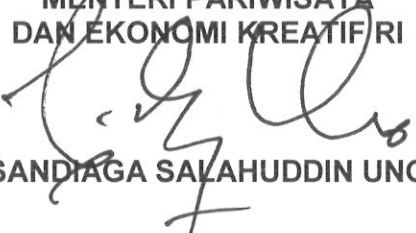
1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI agar penghematan Anggaran APBN TA 2021 sebesar **Rp 342.145.794.000,-** (*tiga ratus empat puluh dua miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) tidak mempengaruhi target prioritas nasional dan program prioritas Kemenparekraf/Baparekraf RI.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memastikan alokasi dukungan K/L dalam pembangunan pariwisata sebagaimana yang dirilis oleh Kemenkeu RI sebesar 14,2T.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI, agar alokasi dukungan K/L terkait untuk pembangunan pariwisata pada tahun 2021 sebesar **Rp 9.991.659.700.000,-** (*Sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) dikoordinasikan dan dikonsolidasikan kepastian penggunaan anggarannya untuk pengembangan pariwisata, termasuk dalam upaya mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan disekitar daerah destinasi wisata prioritas, superprioritas dan destinasi unggulan di setiap daerah.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahan Program Hibah Pariwisata tahun 2020, dan melakukan perencanaan secara optimal terhadap Program Hibah Pariwisata pada tahun 2021 dan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi X yang akan datang, agar Komisi X dapat melakukan pengawasan terhadap program tersebut sehingga daya serap anggarannya dapat meningkat dan implementasinya tepat sasaran.
5. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memperhatikan substansi supaya isu krusial yang berpotensi menjadi permasalahan terkait hak cipta, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan K/L terkait agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dapat selesai sesuai target.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyusun konsep destinasi wisata yang terintegrasi dengan Destinasi Prioritas dan Super Prioritas dalam bentuk dokumen akademik secara komprehensif dan menyampaikannya kepada Komisi X DPR RI.
7. Dalam upaya pengembangan desa wisata, Komisi X DPR RI menyampaikan sikap dan pandangan:
  - a. mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera melakukan dan menyelesaikan kajian secara komprehensif mengenai proyeksi pembangunan desa wisata, termasuk peningkatan jumlah secara signifikan, persebaran wilayah dan kriterianya.
  - b. mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan kolaborasi dengan komunitas serta perguruan tinggi.

c. mendorong untuk memberikan dukungan kepada generasi muda untuk dapat menggerakkan desa wisata baik dalam bentuk pendampingan maupun program bantuan.

8. Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang belum terjawab paling lambat 8 April 2021.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.55 WIB

**MENTERI PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF RI**  
  
**SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**

**KETUA RAPAT,**  
  
**H. SYAIFUL HUDA**